

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN  
ANGGARAN BELANJA MODAL**  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

Disusun Oleh :

Endah Sri Purwanti  
B12.2011.01815

Fakultas ekonomi dan bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro  
Email : [212201101815@mhs.dinus.ac.id](mailto:212201101815@mhs.dinus.ac.id)

**ABSTRACT**

The goals of this research are to investigate (1) the influence of economic development to allocate capital expenditure budget in Central Java (2) the influence of locally generated revenue to allocate the capital expenditure budget in Central Java (3) the influence of the general allocation fund to allocate the capital expenditure budget in Central Java (4) the influence of the specific allocation fund to allocate the capital expenditure budget in Central Java. This research examine the relationship between capital budget as the dependent variable and the economic development, locally generated revenue, general allocation fund and specific allocation as the independent variable.

The sample used in this research from 35 district or city in Central Java. It comes from the budget revenue and expenditure report (APBD) since 5 years beginning from (2008 – 2012). In conducting this research, the researcher used census method takes all the population of the date. The tool which used by the researcher is multiple linear regression with test t, f and coefficient of determination.

The result of this research shows that in partial general allocation fund (DAU) has significant influence to the capital budget. Whereas, the economic development, the locally generated revenue (PAD) and specific the allocation budget (DAK) have no significant influences to the budget revenue. In stimulants way of the economic development, the locally generated revenue (DAK) has the specific influence to the budget revenue.

**Keywords: Economic Development, Locally Generated Revenue, General Allocation, Specific Allocation Fund and Budget Revenue.**

**PENDAHULUAN**

**Latar belakang masalah**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Pelaksanaan otonomi daerah di berlakukan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini (Harianto dan Adi, 2007).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat

yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post accountability*. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan

kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasional, dan belanja pemeliharaan.

2. Anggaran modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelanjaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### **Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan akit dari penerapan otonomi daerah di indonesia. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima penyerahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya disusun oleh Pemda untuk disetujui. Setelah pemda menyetujui PPAS, selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

### **Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik**

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak prinsipal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak ang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal.

### **Hubungan Keagenan antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemda) menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada

DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda).

### **Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik**

Dalam hubungan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Von Hagen (2003) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menepatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

### **Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia**

Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman pada Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto, 2007).

### **BELANJA MODAL**

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Peningkatan kualitas publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain :

1. Belanja Modal Tanah  
Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

## **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Darwanto dan Yustikasari (2007). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

## **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah dalam proses otonomi yang dilakukan. Pendapatan Asli Daerah tentu berbeda-beda disetiap daerah, mengingat kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan itu tergantung dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimilikinya dan juga potensi dari daerah itu untuk mengelolanya.

PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Daerah dilarang : menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

### **Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

### **DANA ALOKASI KHUSUS**

Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan

umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Provinsi Jawa Tengah dari Periode 2008-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana alokasi Khusus (DAK). Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Data sampel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus Provinsi Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan yang satu dari Pemerintahan daerah Jawa Tengah. Dari laporan realisasi APBD tahun 2008-2012 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.1**

**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	75	3.59	6.48	5.0984	.65889
PAD	75	38.00	779.00	109.6533	108.99907
DAU	75	236.00	991.00	574.4533	178.58122
DAK	75	9.00	118.00	54.6000	24.52467
BM	75	25.00	334.00	134.8800	57.67663

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	75	3.59	6.48	5.0984	.65889
PAD	75	38.00	779.00	109.6533	108.99907
DAU	75	236.00	991.00	574.4533	178.58122
DAK	75	9.00	118.00	54.6000	24.52467
BM	75	25.00	334.00	134.8800	57.67663
Valid N (listwise)	75				

Sumber :Hasil Olah Data (SPSS 16.0)

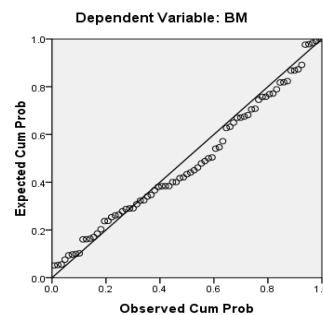
### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

**Gambar 4.1**

### Hasil Uji Normalitas :Grafik Normal Probably Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik (Ghozali, 2009). Gejala Multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka bebas multikolonieritas.

**Tabel 4.3**



## Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	34.321	51.008		.673	.503		
	PE	-.415	10.054	-.005	-.041	.967	.678	1.474
	PAD	.112	.062	.213	1.810	.075	.649	1.541
	DAU	.170	.043	.525	3.926	.000	.500	1.998
	DAK	-.129	.294	-.055	-.439	.662	.571	1.751

Sumber :Hasil Olah Data (SPSS 16.0)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (tabel 4.3), Hasil Uji Multikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* PE sebesar 0,678, PAD sebesar 0,649, DAU sebesar 0,500, DAK sebesar 0,571. Keempat variabel independen tersebut memiliki nilai *olerancediatas* 0,10. Untuk nilai VIF PE sebesar 1,474, PAD sebesar 1,541, DAU sebesar 1,998, DAK sebesar 1,751. Dari keempat variabel independen tersebut memiliki nilai VIF dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi korelasi sehingga bebas dari gejala multikolinieritas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (dw test) dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi : Durbin-Watson**

Model Summary<sup>b</sup>

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.611 <sup>a</sup>	.374	.338	46.92942	1.970

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, PE, DAU

b. Dependent Variable: BM

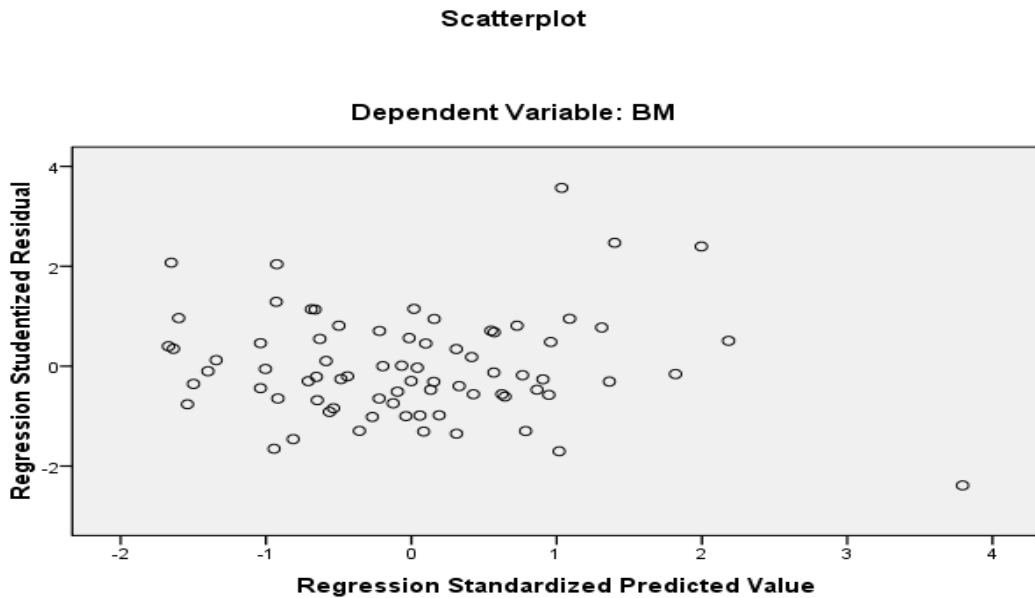
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi (tabel 4.4), maka dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,970. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 75 dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Oleh karena nilai DW 1,970 lebih besar dari batas atas (du) 1,7390 dan kurang dari (4-du) 2,261, maka keputusannya adalah H<sub>0</sub> tidak ditolak. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat autokorelasi (sesuai dengan tabel pengambilan keputusan).

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara merata dan data tersebut secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)**

Pengujian simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2009).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji f**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92001.968	4	23000.492	10.444	.000 <sup>a</sup>
	Residual	154165.952	70	2202.371		
	Total	246167.920	74			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, PE, DAU

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel uji ANOVA atau uji F, diperoleh F hitung sebesar 10,444 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi F dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu : Belanja Modal. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal dalam APBD.

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.321	51.008		.673	.503
	PE	-.415	10.054	-.005	-.041	.967
	PAD	.112	.062	.213	1.810	.075
	DAU	.170	.043	.525	3.926	.000
	DAK	-.129	.294	-.055	-.439	.662

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 4.6 pengujian parsial, dapat dilihat bahwa dari keempat variabel independen hanya variabel DAU yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas DAU sebesar 0,000 yang dibawah tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,967, PAD sebesar 0,075 dan DAK sebesar 0,662 yang nilainya diatas tingkat signifikansi 0,05.

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji tingkat keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai *adjusted R-square* ( $R^2$ ) (Ghozali, 2009).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.310 <sup>a</sup>	.096	.044	28.34681

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, PE, DAU

Sumber : Hasil Olah Data (SPSS 16.0)

Dalam tabel 4.7 hasil uji koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0.044 yang artinya 4,4% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya (100% - 4,4% = 95.6%) dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

#### Analisi Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen belanja modal dipengaruhi oleh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian persamaan sistematis sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.321	51.008		.673	.503
	PE	-.415	10.054	-.005	-.041	.967
	PAD	.112	.062	.213	1.810	.075
	DAU	.170	.043	.525	3.926	.000
	DAK	-.129	.294	-.055	-.439	.662

a. Dependent Variable: BM

$$\text{Belanja Modal} = 34,321 - 0,415 \text{ PE} + 0,112 \text{ PAD} + 0,170 \text{ DAU} - 0,129 \text{ DAK}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan :

1. Nilai konstanta sebesar 34,321 artinya apabila nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bernilai constant/tetap maka belanja modal bernilai positif Rp 34,321
2. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,415 menyatakan bahwa setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 Rupiah, maka akan menurunkan belanja modal sebesar 0,415 Rupiah
3. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,112 menyatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 Rupiah, maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,112 Rupiah
4. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,170 menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1 Rupiah, maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,170 Rupiah

Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,129 menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar 1 Rupiah, maka akan menurunkan belanja modal sebesar 0,129 Rupiah

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian regresi linier berganda, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.
3. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung dengan situasi dan kondisi tiap-tiap daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat serta terdapat kecenderungan dan ketergantungan Pemerintah Daerah pada transfer dari pusat, dalam hal ini Dana Alokasi Umum untuk membiayai pengeluarannya

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti berikutnya, data yang digunakan tidak terbatas pada nilai yang tercantum dalam realisasi laporan anggaran, sebaiknya menggunakan rasio yaitu perbandingan realisasi laporan anggaran dengan alokasi belanja tidak langsung.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain, baik jenis-jenis penerimaan daerah lainnya maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah.
3. Diharapkan pada penelitian berikutnya yang akan membahas topik yang sama, agar memperluas ruang lingkup penelitiannya.

#### **DAFTAR PUSRTAKA**

- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta. Departemen Keuangan RI. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2009*. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). akses 05 Juni 2009.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Data Series Keuangan Daerah", <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit – Undip.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukrie. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan perkapita" *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kusnandar dan Siswanto, Dodik. 2012. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal". Universitas Indonesia. Jakarta.